

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penelitian ini membahas mengenai eksistensi Purnawirawan TNI yang memiliki kedudukan sebagai aktor di dalam sistem demokrasi pada masa pasca orde baru. Purnawirawan (Purn.) merupakan sebuah gelar bagi para pensiunan tentara, baik TNI maupun Polri, gelar ini diberikan ketika para anggota TNI maupun Polri sudah tidak aktif berperan dalam tugas kemiliteran. Keberadaan aktor purnawirawan TNI dalam lingkaran kekuasaan presiden, begitu terlihat dalam konteks kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada periode pertama pemerintahannya (2014-2019), hingga periode keduanya (2019-2024) (Anggoro dkk, 2019).

Kehadiran purnawirawan TNI ke dalam sistem pemerintahan sering kali dikaitkan dengan arus balik pada masa pemerintahan Orde Baru. Pada era pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto memberikan posisi untuk militer dalam tampuk struktur pemerintahan, hal tersebut ditujukan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang memprioritaskan kepada sebuah kondisi stabilitas politik. Dapat dikatakan sumber kekuatan Orde Baru sangat didominasi erat oleh militer. Akhirnya pemerintahan tersebut dikecam oleh karena sistem kekuasaan yang represif-otoriter dan sistem ekonomi liberal, dengan perluasan lahan investasi tanpa menjaga kedaulatan rakyat. Pola kekuasaan represif-otoriter dari kekuasaan Orde Baru ditopang oleh kekuatan militer, dengan doktrin dwifungsi ABRI. Masuknya purnawirawan TNI ke dalam sistem politik dikhawatirkan menjadi bagian dari upaya menguasai pemerintahan melalui mekanisme demokrasi (Soesilo, 2015).

Berakhirnya pemerintahan Soeharto pada tahun 1998, mengantarkan pada masa transisi politik dan militer yang dikenal sebagai Reformasi TNI. Reformasi sektor keamanan di Indonesia dilaksanakan awal mulanya pada tahun 2004, yang memiliki empat tujuan utama antara lain: (1) menghapus keterlibatan militer dalam politik, (2) menghentikan praktik bisnis militer, (3) memisahkan kepolisian dari militer, dan (4) membangun kontrol sipil dan supremasi atas militer. Tujuan tersebut diwujudkan dalam dua undang-undang: UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI (Sebastian dkk., 2018).

Indonesia memasuki tahapan transisi demokrasi atau reformasi nasional, pasca pengunduran diri Presiden Soeharto, guna membangun sistem nasional yang lebih demokratis dan modern. Reformasi TNI juga turut dikawal oleh beberapa tokoh purnawirawan TNI, di antaranya Jenderal TNI Wiranto dan Letnan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mereka berpikir reformis dalam upaya mengurangi peran politik militer di Indonesia. Sejumlah upaya dilakukan mulai dari restrukturisasi organisasi dilakukan oleh militer, termasuk likuidasi struktur sosial politik TNI dan kekaryaan (penugasan militer) personil untuk posisi pemerintah non-militer; pemisahan polri dari militer; dan penarikan dukungan resmi militer terhadap Golkar, partai yang berkuasa selama rezim Orba. Jatuh kursi di parlemen juga dikurangi saat pemilihan umum pertama pasca-Orba tahun 1999, sampai akhirnya ditarik sepenuhnya dari parlemen pada 2004 (Mukhtar, 2017).

Salah satu tantangan sulit yang negara hadapi setelah masa Orde Baru bertransisi ke masa Reformasi, adalah untuk membangun sistem sosial politik yang demokratis antara sipil dan militer. Salah satu faktor tantangan tersebut adalah kehadiran para jenderal Purnawirawan TNI yang mengalami era kepemimpinan Soeharto, memilih untuk berkiprah dan melanjutkan pengabdianya kepada negara melalui politik, setelah pensiun dari dinas aktif kemiliterannya (Indrawan, 2021).

Presiden Joko Widodo cenderung mengadopsi pendekatan lepas tangan dalam pengelolaan urusan militer dan kebijakan pertahanan sehari-hari pada periode pertama kepemimpinannya. Beliau mengandalkan sekelompok pensiunan jenderal sebagai perantaranya dengan militer Indonesia (Tentara Nasional Indonesia, atau TNI). Beliau juga memberikan otonomi organisasi kepada TNI bahkan mendorong keterlibatannya di ranah nonmiliter, mulai dari kontraterorisme hingga program swasembada pangan (Laksmiana, 2019).

Keterlibatan TNI di dalam politik juga kian terlihat dari eksistensi purnawirawan TNI di dalam ruang sipil pasca kemenangan Joko Widodo pada Pilpres tahun 2014. Presiden Joko Widodo mendatangkan *euphoria* “kemenangan sipil”, karena pada saat itu lawan politiknya adalah sosok purnawirawan TNI, yaitu Prabowo yang memiliki latar belakang militer (Efriza, 2014). Pada periode pertama kepemimpinan Joko Widodo, ia mengangkat mantan perwira jenderal atau purnawirawan TNI di beberapa pos pemerintahannya, seperti Kepala Staf

Kepresidenan, Menteri Pertahanan, dan Kepala Badan Intelijen Negara. Merujuk pada data yang diperoleh dari Kata Data, jumlah jenderal TNI di pemerintahan Joko Widodo pada masa periode pertamanya ada 9 (sembilan), yakni Agum Gumelar, Moeldoko, Yusuf Kartanegara, Sidarto Danusubroto, Ryamizard Ryacudu, Budi Gunawan, Subagyo Hadi Siswoyo, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Wiranto. Purnawirawan TNI yang menempati pos pemerintahan pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo Moeldoko, Luhut Binsar Pandjaitan, Wiranto, Subagyo Hadi Siswoyo, Doni Monardo, Prabowo Subianto, Muhammad Herindra, Fachrul Razi, Terawan Agus Putranto, dan Hadi Tjahjanto (Hartriani, 2018).

Presiden Joko Widodo sebagai anggota partai PDIP, tidak bisa memegang andil utuh terhadap politisi partai-partai politik. Jefferey A. Winters seorang Indonesianis, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo merupakan presiden yang tidak memiliki kekuatan politik besar, setelah mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), hal ini karena mereka tidak memiliki latar belakang yang memegang andil partai politik, dan juga bukan merupakan kalangan militer (pinterpolitik.com, 2017).

Presiden Joko Widodo pada tahun 2015, mendirikan sebuah lembaga strategis sebagai pendukung presiden dan wakil presiden. Lembaga tersebut dilandasi oleh Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2015 Tentang Kantor Staf Presiden yang sekarang telah diperbarui menjadi Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden. Lembaga tersebut merupakan lembaga non-struktural yang memiliki peran dan fungsi untuk membantu tercapainya percepatan dan pengendalian program prioritas nasional, menyelenggarakan komunikasi politik kepresidenan, dan membantu dalam mengelola isu strategis yang menjadi program prioritas nasional (KSP, 2021).

Kantor Staf Presiden secara struktural dipimpin oleh seorang Kepala Staf Kepresidenan yang dalam melaksanakan peran dan fungsinya, dibantu oleh lima kedeputian. Presiden Joko Widodo melantik Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Kepala Staf Kepresidenan di periode pertama pemerintahannya tepatnya pada 31 Desember 2014 – 2 September 2015. Kemudian, pasca Presiden Joko Widodo menempatkan Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko Polhukam, posisi Kepala Staf Kepresidenan diisi oleh Teten Masduki, pada

2 September 2015 – 18 Januari 2018 (Nugroho, 2020). Pada saat kepemimpinan Teten Masduki, KSP dinilai efektif menjadi kepanjangan tangan tempat pengaduan masyarakat. Ketepatannya dalam mengelola mengenai berbagai isu strategis seputar infrastruktur, pembangunan manusia, masalah hukum, hak asasi manusia, dan permasalahan lainnya menjadi nilai *plus* dalam pandangan masyarakat (Natalia, 2018).

Pada akhir periode pertama pemerintahannya, Presiden Joko Widodo memilih seorang aktor purnawirawan TNI sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Setelah kepemimpinan Teten Masduki berakhir, Kantor Staf Presiden kembali dipimpin oleh seorang purnawirawan TNI, yang merupakan salah satu mantan Panglima TNI yaitu Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko (18 Januari 2018 – petahana). Pada tahun 2019, periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko kembali dipilih dan dipercayakan oleh presiden untuk tetap menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (Sukmawan, 2022).

Kembalinya purnawirawan TNI ke dalam lingkaran kekuasaan presiden Joko Widodo, menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. KSP di bawah kepemimpinan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dinilai tidak akan efektif, karena disebut hanya akan menjadi strategi politik Presiden Joko Widodo sebagai upaya *bargaining* untuk menghadapi oposisi atau lawan politik presiden Joko Widodo. Pengamat menilai bahwa KSP di bawah kepemimpinan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko hanya akan memperkuat posisi negara dibandingkan kepentingan masyarakat sipil. Hal tersebut karena pendekatan yang digunakan KSP oleh Moeldoko hanya sebagai sarana untuk kepentingan stabilitas politik dalam rangka menguatkan posisi Presiden Joko Widodo sebagai *incumbent*. Hubungan yang harmonis antara KSP dan masyarakat secara langsung, dapat terputus karena masyarakat enggan melihat status Jenderal (Purn.) Moeldoko yang berasal dari militer (cnnindonesia.com, 2018).

Latar belakang militer yang dimiliki oleh Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, mampu mempengaruhi karakteristik kepemimpinannya sebagai aktor militer yang menjabat di Kantor Staf Presiden. Sebagai lembaga penghubung antara kepentingan politik presiden dan kepentingan masyarakat Kantor Staf Presiden perlu mendorong sukseksi demokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Efektivitas lembaga

tersebut sangat dipengaruhi oleh karakteristik kepala staf sebagai pimpinan tertinggi. Dalam menjalankan fungsi dan tugas yang diemban oleh KSP, tidak terlepas dari faktor kepemilikan modalitas yang dikerahkan seorang pemimpin untuk dapat mempengaruhi keberhasilan atau bahkan ketidakefektifan dalam mengemban tugas dan fungsi suatu lembaga (Nugroho, 2020).

Pengalaman pada masa orde baru yang dialami oleh masyarakat terhadap adanya unsur militer ke dalam lembaga pemerintahan akan memberi efek buruk terhadap demokrasi, merupakan hal yang dapat dipahami. Purnawirawan TNI memiliki modalitas yang menjadikannya berbeda dengan pensiunan lain. Permasalahan budaya, doktrin TNI, pengalaman pada saat masa dwifungsi ABRI dan latar belakang yang mereka miliki menjadi alasan utama. Purnawirawan TNI telah terbiasa dengan pendekatan militer dan cara yang relevan dengan fungsinya sebagai alat pertahanan negara dan kultur komando yang secara prinsip bertentangan dengan nilai kebebasan di dalam kehidupan era demokrasi. Selain itu aktor purnawirawan TNI yang menjabat di lingkaran kekuasaan presiden rata-rata merupakan pelaku usaha atau pemilik perusahaan. Hal tersebut bisa berpotensi menimbulkan keuntungan kelompok elit dalam proses pembuatan kebijakan (Nathaniel, 2020).

Keberadaan aktor purnawirawan TNI di beberapa institusi demokrasi, pada era pasca orde baru saat ini, dinilai problematik bagi kalangan masyarakat sipil. Modalitas yang dibawa oleh mantan prajurit TNI berpotensi menjadi sebuah ancaman bagi proses demokrasi di Indonesia. Namun untuk mengetahui hal tersebut, perlu meninjau terkait bagaimana peran yang dimainkan oleh Purnawirawan TNI saat menjabat di pemerintahan sipil. Oleh karena itu penulis bertujuan untuk meneliti terkait bagaimana penggunaan modalitas yang dimiliki oleh Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko ketika menjabat menjadi Kepala Staf Kepresidenan RI (Soesilo, 2015) .

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membantu penulis menemukan *state of the arts* dalam penelitian penulis. Penelitian pertama yang menjadi referensi penulis adalah jurnal kualitatif karya Arie Soesilo (2015), yang berjudul **“Jaringan Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia dalam Politik Relasi Sipil-Militer Pasca Reformasi”**. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan

purnawirawan militer dalam arena politik, telah menunjukkan karakteristik yang baru pada hubungan sipil-militer di Indonesia pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Gagasan utama yang ingin disampaikan di dalam jurnal ini adalah, mengenai pro-kontra mengenai perdebatan, boleh-tidaknya seorang purnawirawan memiliki posisi strategis dalam perpolitikan nasional di Indonesia meskipun masa dinas aktif kemiliterannya sudah berakhir. Hal tersebut seringkali dikaitkan dengan sebuah adagium yang berbunyi: “*old soldier never die, they just fade away*”. Kelebihan dari penelitian ini adalah dengan jelas membahas terkait *Actor Network Theory* dengan melakukan wawancara mendalam terhadap purnawirawan sehingga dapat melihat secara lebih dalam terkait motif punrawirawan TNI masuk kedalam politik. Kekurangan dalam penelitian ini terdapat kepada kurangnya jumlah informan, seharusnya dapat menggunakan metode *mix method* sehingga dapat melihat lebih jauh terkait motif-motif yang dimiliki oleh purnawirawan yang masuk kedalam politik.

Sebagian pendapat menyatakan bahwa sah-sah saja apabila seorang militer yang telah memasuki masa purna, terjun ke dalam arena politik nasional. Karena statusnya yang sudah menjadi warga negara sipil di mana sama-sama memiliki hak sipil serta hak politik secara setara dengan warga negara lain. Eksistensi purnawirawan di dalam ruang politik, menimbulkan konsekuensi terhadap pola mobilisasi purnawirawan TNI yang berlangsung pada luasnya jaringan yang dimilikinya, dari rekan dekat, cabang, korps ataupun rantai komando lainnya yang dilandasi oleh loyalitas. Penelitian ini menekankan aspek *Actor Network Theory* dimana melihat kepada relasi yang dibangun di antara aktor-aktor militer dan politik sehingga membentuk sebuah kekuatan, penelitian ini menggali proses relasional antar aktor yang terlibat di dalam jaringan.

Persamaan penelitian Arie S. Soesilo (2015) dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai purnawirawan TNI yang memiliki kiprah di dalam politik. Perbedaan penelitian Arie S. Soesilo (2015) dengan penelitian penulis adalah, penelitian ini membahas mengenai faktor apa saja yang menyebabkan para Purnawirawan TNI berkiprah ke dalam politik, yang mencakup berbagai macam motivasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Actor Network Theory* (ANT),

sedangkan penelitian penulis berfokus pada penggunaan modalitas Purnawirawan TNI dalam memainkan perannya sebagai aktor politik di era demokrasi.

Penelitian kedua adalah jurnal kualitatif karya Dea Arsyad Mujtahid Shibghotulloh pada tahun 2019 yang berjudul ***“Retirement Rivality of The Military General in Selecting President 2019”***. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang pensiunan jenderal TNI memiliki kekuatan politik yang dapat mempengaruhi pihak-pihak lain, Penelitian ini meninjau pada aspek elektoral pada saat pemilihan presiden tahun 2019, di mana saat itu lawan politik Presiden Joko Widodo adalah merupakan pensiunan Jenderal, akan tetapi dengan kekuatan jaringan purnawirawan baik dari TNI atau Polri yang menjadi tim sukses Presiden Joko Widodo, ia berhasil merebut kursi nomor satu di Indonesia, dan kemenangannya disebut menjadi kemenangan sipil.

Kelebihan dari penelitian Shibghotulloh (2019) terkait pada penjelasan terhadap tiga purnawirawan TNI yang berpengaruh pada politik di Indonesia, sehingga penelitian ini dapat membahas lebih dalam terkait rivalitas militer yang terjadi pada Pemilihan Presiden 2019. Kekurangan dalam penelitian ini adalah masih kurang mendalamnya membahas aktor-aktor purnawirawan yang berperan pada pemilihan presiden 2019. Persamaan penelitian Shibghotulloh (2019) dengan penelitian penulis adalah pembahasan mengenai kiprah Purnawirawan TNI di dalam ranah politik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah aspek penelitiannya yang terletak pada ranah pemilihan presiden (elektoral). Penelitian penulis membawa kebaruan mengenai aktor dari aktor purnawirawan TNI yang memiliki jabatan strategis ketika presiden Joko Widodo menjabat sebagai presiden, penggunaan modalitas Purnawirawan TNI dalam memainkan perannya sebagai aktor politik di era demokrasi.

Penelitian ketiga adalah jurnal kuantitatif karya Leonard Reissman tahun (2015) yang berjudul ***"Life Careers, Power and the Professions: The Retired Army General"***. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah sipil mulai mengandalkan nasihat dan juga peran dari militer hingga pensiunan militer dalam aspek kebijakan luar negeri, kekuatan bersenjata, pengembangan nuklir, dan pertahanan sipil. Fokus penelitian Reissman (2015) juga membahas kehidupan karir

para purnawirawan militer pasca selesai dari tugas militernya, ada yang memilih menjadi petinggi perusahaan, berpolitik, hingga menjadi pengusaha.

Kelebihan dari penelitian Reissman (2015) terdapat pada penjelasan tabel kuisisioner yang sangat informatif sehingga dapat menjelaskan purnawirawan pasca berkarir di militer. Kekurangan dari penelitian tersebut terdapat pada kurangnya informasi terkait militer yang memiliki karir politik setelah berkarir di militer dan menjadi purnawirawan. Persamaan penelitian Reissman (2015) dengan penelitian penulis adalah pembahasan mengenai kehidupan karir purnawirawan TNI setelah pensiun. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah pembahasan Reissman (2015) fokus kepada pembahasan kehidupan karir purnawirawan TNI setelah pensiun dari dinas aktif militernya. Penelitian penulis berfokus pada penggunaan modalitas Purnawirawan TNI dalam memainkan perannya sebagai aktor politik di era demokrasi.

Penelitian selanjutnya adalah disertasi kualitatif karya Michael A. Robinson (2018) yang berjudul *“Danger Close: Military Politicization and Actor Credibility”* diterbitkan oleh ProQuest Dissertations Publishing: Stanford University. Penelitian ini membahas serta menganalisis besarnya pengaruh politik dari kalangan militer baik aktif atau pensiunan dan kepercayaan publik terhadapnya. Penelitian Robinson (2018) menjelaskan adanya pengaruh dari aktor militer yang didefinisikan secara luas untuk memasukkan para pemimpin militer senior baik yang aktif maupun yang sudah pensiun, dinilai penting mengingat tingkat kepercayaan yang tinggi yang secara konsisten diungkapkan oleh publik ke hampir setiap lembaga politik dan sosial di Amerika Serikat.

Kelebihan penelitian Robinson (2018) terdapat pada penjelasan yang sistematis terkait penjelasan elite aktor militer. Kekurangan dari penelitian tersebut terdapat pada kurangnya pembahasan hubungan sipil-militer dalam melihat peran aktor elite militer. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah, kaitannya dengan keberadaan aktor dari pensiunan militer yang berada di lembaga politik. Pengaruh sinyal elit ini sangat terkait dengan kesan tingkat individu tentang kredibilitas militer. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada subjek penelitian dan lokasi penelitian dilakukan. Selain itu penelitian ini memakai teori hubungan sipil militer untuk menjelaskan

pengaruh militer aktif/pensiunan ke dalam politik dan mengintervensi kebijakan publik di Amerika Serikat. Teori yang digunakan penulis adalah teori modalitas dan konsep aktor, untuk menjelaskan kedudukan atau posisi aktor purnawirawan TNI dan penggunaan modalitas purnawirawan TNI dalam memainkan perannya sebagai aktor yang menduduki jabatan strategis di pemerintahan.

Penelitian keempat adalah jurnal kualitatif karya Teguh Anggoro (2019) yang berjudul **“Kiprah Politik Purnawirawan (Studi Tentang Strategi Politik Pemenangan Calon Legislatif Purnawirawan TNI pada Pemilu Legislatif di Kota Banjar)”**. Penelitian ini menjelaskan terkait purnawirawan TNI yang memulai kiprahnya di dalam politik setelah selesai dari tugas militernya. Penelitian ini mengidentifikasi motivasi apa yang mendorong para purnawirawan TNI masuk ke dalam politik lokal, serta bagaimana strategi mereka dalam memenangkan pesta pemilu legislatif. Objek penelitian ini adalah elit purnawirawan TNI yang berasal dari partai PDIP, Golkar, Gerindra, dan PBB di Kota Banjar. Kelebihan penelitian tersebut adalah penjelasan mendalam terkait purnawirawan dalam politik lokal dengan menggunakan pola jaringan-jaringan yang terbentuk saat bertugas di militer serta terdapat wawancara langsung terhadap calon legeslatif dari purnawirawan. Kekurangan dari penelitian tersebut terdapat pada ruang lingkup yang masih sebatas di kota banjar sehingga perlu adanya komparasi terhadap purnawirawan di tempat lainnya.

Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pembahasan mengenai kiprah purnawirawan TNI di dalam arena politik, sehingga penelitian ini memperluas pandangan penulis terkait “modal” apa saja yang dimiliki oleh purnawirawan TNI agar dapat meneruskan perannya di dalam dunia politik. Kekurangan penelitian ini adalah masih belum menjelaskan secara komprehensif terkait strategi pada purnawirawan TNI untuk dapat memenangkan pemilu legislatif karena hanya berfokus pada pola klientelisme. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penggunaan teori, penelitian tersebut menggunakan teori strategi. Teori yang digunakan penulis adalah teori aktor dan konsep modalitas, untuk menjelaskan kedudukan atau posisi aktor purnawirawan TNI dan penggunaan modalitas purnawirawan TNI dalam memainkan perannya sebagai aktor yang menduduki jabatan strategis di pemerintahan.

Penelitian kelima adalah jurnal kualitatif karya Yusa Djuyandi (2019) yang berjudul “**Kementerian Pertahanan: Birokrasi Sipil dan Hierarki Militer**”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan militer di dalam lembaga sipil menyebabkan banyak obstruksi dalam pelaksanaannya. Dominasi militer di tubuh birokrasi Kemhan terjadi karena adanya faktor historis, solidaritas dalam tubuh militer, perbedaan karakter antara sipil dan militer, adanya jabatan yang secara khusus diisi oleh militer, dan budaya militer yang sudah melekat di tubuh Kemhan. Penelitian tersebut juga menjelaskan adanya pola *top-down* di dalam kepemimpinan militer di lembaga Kemhan, hal ini dianggap mencederai kaidah lembaga sipil yang menerapkan pola *bottom-up* dalam proses pelaksanaannya. Kelebihan penelitian tersebut terdapat pada penjelasan terkait peran militer pada kementerian pertahanan yang cukup mendalam. Kekurangan penelitian ini adalah terdapat pada tidak adanya wawancara mendalam terhadap aktor-aktor purnawirawan TNI di dalam kementerian pertahanan.

Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah pembahasan mengenai adanya keterlibatan militer di lembaga sipil. Penelitian penulis berfokus pada keterlibatan purnawirawan TNI di lembaga sipil. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah hubungan sipil-militer, sedangkan penelitian penulis menggunakan teori modal, untuk menjelaskan bagaimana purnawirawan TNI menggunakan modal yang ia miliki dalam menjalani perannya di lembaga sipil.

Penelitian keenam adalah *thesis* karya Muhammad Reza Indrawan yang berjudul “**Purnawirawan dan Politik Studi atas Keterlibatan Purnawirawan TNI dalam Pemerintahan Joko Widodo**”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa latar belakang penunjukan purnawirawan TNI oleh Presiden Joko Widodo dilandasi oleh beberapa hal yaitu para purnawirawan TNI memiliki pengalaman kepemimpinan, untuk memperkuat kabinet dan pemerintahan serta untuk mempertahankan posisi Presiden Jokowi sebagai petahana pada pemilihan presiden 2019. Dampak serta kontribusi dari keterlibatan purnawirawan TNI adalah keseimbangan di dalam kabinet bagi pemerintahan Joko Widodo, karena tidak hanya sipil yang ikut serta untuk bergabung dalam pemerintahan, tetapi purnawirawan TNI yang berlatar belakang militer juga diberi ruang untuk turut bersama-sama berkontribusi maksimal guna mewujudkan tujuan yang hendak

dicapai oleh pemerintah. Sinergi yang kuat antara sipil dan purnawirawan TNI dalam pemerintahan memberikan pengaruh secara signifikan dalam memperkokoh kelangsungan kerja kabinet sesuai dengan yang diharapkan oleh Presiden Joko Widodo.

Kelebihan penelitian tersebut terdapat pada penjelasan peran purnawirawan TNI dalam kabinet Joko Widodo yang cukup menjelaskan dengan menggunakan teori kekuatan politik. Kekurangan dari penelitian ini adalah kurangnya wawancara terhadap aktor-aktor purnawirawan TNI yang terdapat pada kabinet Joko Widodo. Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah peran aktor purnawirawan TNI pada pemerintahan sipil. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terdapat pada teori yang digunakan, penulis menggunakan teori modalitas untuk melihat purnawirawan TNI dalam jabatan pemerintahan sipil.

Penelitian ketujuh adalah jurnal kualitatif dari Pion Berlin & Martinez (2017) yang berjudul *“Politicians, and Civilians: Reforming Civil-Military Relations in Democratic Latin America”* diterbitkan oleh Cambridge University Press. Penelitian ini membahas serta menganalisis terkait hubungan pemerintah, militer dan masyarakat sipil dalam memperkuat demokrasi. Penelitian Pion Berlin & Martinez (2017) menjelaskan bagaimana urusan sipil militer dengan melihat studi kasus di Argentina, Brasil, Chili, dan Uruguay. Penelitian Pion Berlin & Martinez (2017) menunjukkan bahwa hubungan sipil-militer menjadi komponen vital dalam demokrasi, dimana perubahan demokratis dapat mendorong kepada reformasi hubungan sipil-militer yang meningkatkan kemajuan demokrasi.

Kelebihan penelitian tersebut sangat menjelaskan tekri hubungan sipil-militer khususnya yang terjadi di Amerika Latin. Kekurangan dari penelitian ini adalah perlunya pembahasan komparatif terhadap sipil-militer di asia. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bahwa hubungan sipil-militer menjadi bagian penting dalam mendorong demokrasi khususnya dengan menempatkan purnawirawan yang mendorong demokratisasi dalam jabatan yang diembannya di pemerintahan sipil. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada subjek penelitian serta lokasi penelitian yang dilakukan. Selain itu, penelitian penelitian ini memakai teori hubungan sipil-militer untuk menjelaskan reformasi demokrasi yang terjadi di Amerika Latin.

Teori yang digunakan oleh penulis adalah teori modalitas dan konsep aktor yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana purnawirawan TNI mengerahkan modalitas dalam peran yang dimainkannya sebagai aktor di pemerintahan sipil.

Penelitian kedelapan adalah jurnal dari Mayerchak (2008) yang berjudul **“Review of Legitimizing Military Rule: Indonesian Armed Forces Ideology, 1958-2000, and: Suharto's Armed Forces: Problems of Civil Military Relations in Indonesia”** diterbitkan oleh Virginia Military Institute. Penelitian ini membahas terkait pola militer dalam menguasai di Indonesia secara tertib, terencana, dan bertahap. Penelitian Mayerchak (2008) melihat secara historis militer pada era pemerintahan soeharto yang menunjukkan bahwa perwira di Indonesia memiliki keharusan untuk memasuki politik akibat dari keinginan untuk menciptakan negara-bangsa.

Kelebihan dari penelitian tersebut terdapat pada penjelasan hubungan sipil-militer yang terstruktur di Indonesia. Kekurangan dari penelitian tersebut terdapat pada kurangnya data-data yang ditampilkan oleh penulis terkait hubungan-sipil militer di Indonesia. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bahwa hubungan purnawirawan militer masuk kedalam arena politik tidak menggunakan sistem kudeta seperti yang terjadi oleh negara-negara dunia ketiga. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada hubungan sipil militer yang digunakan dalam penelitian tersebut untuk melihat terkait pola-pola keinginan untuk menciptakan pemerintahan yang berdasarkan kepada kehendak aktor militer, sedangkan dalam penelitian penulis melihat kepada purnawirawan militer yang memiliki keinginan demokratis dalam melaksanakan kepemimpinan di pemerintahan sipil.

Penelitian kesembilan adalah jurnal kualitatif dari Rokvic, Jeftic, & Ivanis (2013) yang berjudul **“Civil–Military Relations and Democratic Control over the Armed Forces in the Republic of Serbia”** diterbitkan dalam jurnal *Armed Force & Society*. Penelitian ini membahas terkait demokratisasi hubungan sipil-militer dan implementasi demokrasi dengan melakukan kontrol terhadap angkatan bersenjata di Republik Serbia. Penelitian Rokvic, dkk., (2013) menemukan bahwa perubahan demokrasi telah membentuk reformasi demokrasi yang terjadi pada militer sehingga menciptakan hubungan sipil-militer yang menjalankan demokrasi.

Kelebihan dari penelitian tersebut adalah terdapat pada penjelasan mendalam terkait kontrol demokrasi terhadap hubungan sipil-militer yang dapat menggambarkan situasi politik dan militer di Serbia. Kekurangan dari penelitian tersebut adalah tidak adanya tabel-tabel penjelas terkait komparasi pada pemerintahan di Serbia. Persamaan penelitian Rokvic, dkk., (2013) dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah dengan melihat keberhasilan demokrasi dalam meningkatkan hubungan sipil-militer sehingga dapat melihat aktor-aktor militer yang memegang demokrasi. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada studi kasus dan subjek yang digunakan, khususnya perbedaan terdapat pada negara eropa dan negara asia tenggara yaitu Indonesia.

Penelitian kesepuluh adalah jurnal kualitatif dari Irsat (2018) yang berjudul **“Modalitas Syamsari Kitta dan Achmad Daeng Se’re Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017”**. Penelitian ini menjelaskan terkait peran modal dalam strategi pemasaran politik Syamsir Kitta dan Achmad Daeng Se’re pada pemilihan Bupati Kabupaten Takalar. Penelitian Irsat (2018) menemukan bahwa modal politik, modal sosial, dan modal ekonomi memiliki peran efektif dalam melakukan pemasaran politik. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran modalitas bagi aktor politik sangat penting untuk memenangkan jabatan politik seperti Bupati.

Kelebihan penelitian tersebut terdapat pada hasil penelitian yang cukup mendalam terhadap modal-modal yang digunakan oleh purnawirawan TNI dalam pemilihan pada jabatan sipil. Kekurangan penelitian tersebut tidak adanya modal sosial yang dijelaskan pada penelitian tersebut sehingga kurangnya penjelasan terkait modal purnawirawan TNI. Persamaan penelitian Irsat (2018) dengan penelitian penulis adalah pada teori modal yang digunakan oleh aktor politik untuk menduduki jabatan-jabatan strategis. Penelitian Irsat (2018) memiliki perbedaan dengan penulis, terdapat perbedaan dalam subjek penelitian khususnya kepada latarbelakang dari subjek penelitian, selain itu terdapat perbedaan dalam penggunaan teori modalitas. Teori modalitas dalam penelitian tersebut digunakan untuk melihat bagaimana modalitas berperan penting bagi aktor politik terhadap kemenangan pada pemilihan, sedangkan penelitian penulis melihat kepada teori

modalitas yang berperan untuk membangun aktor pada aktor purnawirawan di pemerintahan sipil.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu umumnya terletak pada fokus pembahasan mengenai kiprah purnawirawan TNI pada ranah kompetisi elektoral, sedangkan penelitian penulis ingin mengkaji terkait kiprah purnawirawan TNI yang menjabat di pemerintahan sipil. Penggunaan teori modalitas pada penelitian sebelumnya juga menunjukkan penggunaan modalitas digunakan untuk melancarkan aktor purnawirawan TNI untuk mendapatkan kekuasaan atau kemenangan pada pemilihan. Penelitian penulis memberi kontribusi dari penggunaan teori modalitas bahwa, purnawirawan TNI mengerahkan modalitas yang ia miliki untuk memberikannya kemudahan dalam memainkan perannya sebagai aktor yang menjabat di lembaga sipil.

Berdasarkan beberapa studi yang telah dikaji sebelumnya mengenai kiprah Purnawirawan TNI di dalam politik, belum banyak temuan yang mengkaji soal penggunaan modalitas oleh Purnawirawan TNI yang memiliki jabatan di institusi demokrasi pada era pasca orde baru. Sehingga penelitian ini berusaha untuk menguraikan bagaimana kiprah purnawirawan TNI ketika menjadi aktor yang memiliki jabatan di pemerintahan sipil, penelitian ini berfokus pada kasus salah satu Purnawirawan yang berada paling dekat dengan lingkaran kekuasaan presiden, yaitu Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko yang menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan RI di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

I.2 Rumusan Masalah

Berkiprahnya purnawirawan TNI dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo baik periode pemerintahan pertama dan kedua, tentu sudah melalui proses panjang sebelum akhirnya dipilih oleh presiden. Latar belakang penunjukan tentu tidak terlepas dari keahlian dan kemampuan purnawirawan TNI dalam konteks kepemimpinan, pengalaman berorganisasi, memiliki soliditas dan loyalitas, serta kemampuan dalam menyusun strategi. Purnawirawan TNI merupakan aktor yang memiliki privilese atau keunggulan yang menjadikannya berbeda dengan pensiunan lain dalam kepemilikan modalitas. Sebagai aktor yang memiliki posisi, pengaruh, dan reputasi, purnawirawan TNI harus menggunakan modalitas yang dimiliki sesuai dengan prinsip demokrasi. Hal tersebut bertujuan agar Purnawirawan TNI

mampu mendorong suksesi sistem politik yang demokratis. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: **“Bagaimana modalitas yang digunakan oleh Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko dalam menjalankan eksistensinya sebagai Kepala Staf Kepresidenan pada masa pemerintahan Joko Widodo tahun 2019?”**

I.3 Tujuan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis mengharapkan tercapainya tujuan penelitian antara lain adalah:

1. Mengetahui bagaimana Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggunakan modalitas di dalam eksistensinya sebagai aktor pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo.

I.4 Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat memberi manfaat serta berguna bagi semua kalangan, baik mahasiswa, peneliti, dan masyarakat luas. Manfaat penilaian akan diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media literatur yang dapat memperluas perspektif pembaca terutama mahasiswa ilmu politik, terkhusus yang memiliki keminatan terhadap bidang hubungan politik dan militer. Penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, tentang hubungan antara sipil-militer dengan fokus isu mengenai aktor purnawirawan TNI sebagai aktor pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman kepada para pembaca dan menjadi validasi asumsi bahwa aktor purnawirawan TNI yang menjadi aktor yakni Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko memainkan peran sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

I.3 Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini mudah dipahami secara terstruktur dan memudahkan pemahaman pembaca, maka penulis membagi struktur penelitian menjadi 3 (tiga) bab, yaitu:

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara rinci mengenai latar belakang permasalahan yang memaktub rumusan masalah, tujuan dibuatnya penelitian, manfaat dari penelitian, serta bagian teknis penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan landasan teori dan konseptual penelitian yang menjadi bagian kerangka berpikir.

BAB III

METODE PENELITIAN

Di dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai teknis penelitian skripsi yang meliputi, jenis penelitian, mengambil sumber data, teknik pengumpulan data, analisa data, jangka waktu dan objek penelitian secara spesifik.

BAB IV

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Di dalam bab ini penulis menjelaskan hasil penelitian yang menguraikan indikator-indikator penelitian mengenai strategi penggunaan modalitas Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko ketika menjalani eksistensinya sebagai Kepala Staf Kepresidenan pada masa kepemimpinan Joko Widodo tahun 2019.

BAB V

PENUTUP

Di bab ini adalah bagian terakhir di dalam skripsi yang, berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA